

## Kendala Pemerintah Nagari Binjai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam Mitigasi Bencana

Ulva Nurjannah<sup>1</sup>, Zikri Alhadi<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas  
Negeri Padang

Email: [ulvanurjannah16@gmail.com](mailto:ulvanurjannah16@gmail.com)<sup>1</sup>, [zikrialhadi@fis.unp.ac.id](mailto:zikrialhadi@fis.unp.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Nagari Binjai Tapan kerap dilanda bencana banjir, terhitung selama Tahun 2021 hingga tahun 2022 banjir di Nagari Binjai Tapan sudah terjadi lebih dari belasan kali. Pada tahun 2021, Nagari Binjai Tapan mengalami banjir dahsyat yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.850.000.000.- (terdiri dari pemukiman masyarakat, lahan pertanian/perkebunan/peternakan serta infrastruktur dan fasilitas umum). Sehingga artikel ini bertujuan menelaah dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam memitigasi bencana banjir. Untuk menjawab tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan informan yang peneliti ambil gunakan merupakan *purposive sampling*, informan terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari Binjai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Binjai Tapan, Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan dan Masyarakat Nagari Binjai (yang terdampak bencana banjir). Pengumpulan data peneliti lakukan dengan cara observasi, studi dokumen (regulasi, artikel/temuan penelitian, dan buku relevan) serta wawancara. Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam poin yang menjadi kendala dalam mitigasi bencana banjir di Nagari Binjai Tapan, yaitu anggaran yang terbatas, minimnya alat mitigasi kebencanaan, sarana evakuasi kurang memadai, sulitnya izin dari masyarakat untuk membangun *rever wall* di lahannya, kurangnya SDM melakukan mitigasi dan material bahan pembangunan *rever wall* yang minim. Sehingga langkah utama untuk mitigasi bencana banjir Nagari Binjai Tapan, maka enam kendala tersebut harus segera dipenuhi.

**Kata Kunci:** *Nagari Binjai Tapan, Bencana Banjir, Kendala Mitigasi, Pemerintah Nagari*

### Abstract

Nagari Binjai Tapan is often hit by floods, starting from 2021 to 2022 floods in Nagari Binjai Tapan have occurred more than a dozen times. In 2021, Nagari Binjai Tapan experienced a devastating flood that resulted in losses of Rp. 3,850,000,000.- (consisting of community settlements, agricultural/plantation/livestock land as well as

infrastructure and public facilities). So this article aims to examine and describe the obstacles faced by the Nagari Binjai Tapan Government in mitigating flood disasters. To answer this goal, the research method used is descriptive qualitative. The informant retrieval technique that the researchers took was *purposive sampling*, informants consisted of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari Binjai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Binjai Tapan, Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan and the Nagari Binjai Tapan Community (who was affected by the flood disaster). Researcher data collection is carried out by means of observation, document studies (regulations, research articles/findings, and relevant books) and interviews. The research findings show that there are six points that are obstacles in mitigating flood disasters in Nagari Binjai Tapan, namely a limited budget, lack of disaster mitigation tools, inadequate evacuation facilities, difficulty of permission from the community to build a *rever wall* on their land, lack of human resources to carry out mitigation and materials for the construction of *rever wall* which is minimal. So that the main steps for mitigating the Nagari Binjai Tapan flood disaster, the six obstacles must be met immediately.

**Keywords:** *Nagari Binjai Tapan, Flood Disaster, Mitigation Constraints, Nagari Government*

## PENDAHULUAN

Nagari Binjai Tapan merupakan salah satu nagari dari sepuluh nagari yang ada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Binjai Tapan dibentuk melalui Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 47 Tahun 2009. Menurut sejarah, Binjai adalah kampung (pemukiman) tertua di Nagari Tapan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Luas Nagari Binjai Tapan ini ialah 12.31 KM<sup>2</sup>. Nagari Binjai Tapan merupakan salah satu nagari yang rawan bencana alam banjir. Sudibyakto (2011) menjelaskan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi dan mengakibatkan korban berupa penderitaan manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat.

Nagari Binjai Tapan kerap dilanda bencana banjir, terhitung selama Tahun 2021 hingga tahun 2022 banjir di Nagari Binjai Tapan sudah terjadi lebih dari belasan kali. Tercatat bahwa bencana banjir di Nagari Binjai Tapan yang terparah terjadi pada tahun 2021, tepatnya terjadi pada saat hari raya idul fitri 1442 H pada pertengahan bulan Mei 2021. Bencana banjir ini menimbulkan banyak kerugian besar bagi Nagari Binjai Tapan, terlebih nagari Binjai Tapan merupakan salah satu daerah yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Menurut Bakornas (2007) salah satu pemicu dominan yang mengakibatkan bencana menimbulkan korban dan kerugian besar adalah kurangnya pemahaman mengenai karakteristik bahaya, sikap dan

perilaku yang menunjukkan ketidakberdayaan dan ketidaksiapan menghadapi bencana.

Bencana banjir yang kerap melanda Nagari Binjai Tapan telah menyebabkan berbagai persoalan, terutama kerugian yang berdampak langsung. Sebagaimana bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021, kerugian yang dialami oleh Nagari Binjai Tapan begitu besar. Kerugian yang terdiri dari kondisi permukiman masyarakat (rumah, populasi, motor) lahan pertanian/perkebunan/peternakan serta infrastruktur dan fasilitas umum. Untuk lebih spesifik, kerugian yang dialami oleh Nagari Binjai Tapan dari bencana banjir tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Kerugian Nagari Binjai Tapan Akibat Bencana Banjir Tahun 2021**

No.	Bentuk Kerugian	Total Kerugian (Rp)
1.	<b>Pemukiman Masyarakat</b> a. Rumah Rusak = 158 Unit b. Jumlah KK Terdampak = 182 KK c. Populasi Terdampak = 696 Jiwa d. Motor Rusak = 27 Unit	<b>Rp. 600.000.000,-</b>
2.	<b>Lahan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan</b> a. Pertanian (Sawah) = 122 Ha b. Perkebunan (Jagung, Karet dan Sawit) = 86 Ha c. Peternakan - Ayam = 146 Ekor - Kambing = 2 Ekor - Itik = 24 Ekor - Kolam Ikan Mini = 4 Unit	<b>Rp. 750.000.000.-</b>
3.	<b>Infrastruktur dan Fasilitas Umum</b> a. Jembatan = 3 Unit b. Jalan Kabupaten = 2 KM c. Jalan Nagari = 50 KM d. Polongan = 2 Unit e. Sekolah PAUD = 1 Unit f. Kantor Wali Nagari = 1 Unit g. Musholla = 1 Unit	<b>Rp. 2.500.000.000.-</b>
<b>Total</b>		<b>Rp. 3.850.000.000.-</b>

(Sumber: Data Penelitian yang diolah dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari Binjai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Binjai Tapan, Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan dan Masyarakat terdampak bencana banjir)

Bencana yang terjadi menjadi salah satu penyebab tidak tentramnya kehidupan masyarakat, sebagaimana besarnya kerugian yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya mitigasi bencana banjir agar dapat mengurangi dampak yang akan ditimbulkan jika sewaktu-waktu bencana banjir melanda serta tetap dapat menjaga ketentraman Nagari Binjai Tapan. Mitigasi bencana menurut PP RI No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak atau risiko dari bencana, baik melalui pembangunan

fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Bencana yang terjadi merupakan akibat dari suatu peristiwa alam atau dampak dari ulah manusia yang secara tiba-tiba dan progresif menimbulkan banyak dampak negatif secara luar biasa, sehingga diperlukan agar masyarakat yang terdampak menanggapi dengan tindakan luar biasa (Kodoatie, RS., 2010).

Purba, N., (2022) menyatakan bahwa penanggulangan mitigasi bencana sebagai serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan terhadap suatu daerah yang tingkat risiko terjadinya bencananya lebih tinggi, tindakan preventif mencegah bencana, responsif darurat dan rehabilitasi. Seyogyanya Nagari Binjai Tapan telah melakukan upaya mitigasi bencana dalam menghadapi bencana banjir. Mulai dari pemerintah nagari dalam bentuk memberikan peringatan dini untuk masyarakat agar tetap waspada, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri menghadapi bencana banjir. Masyarakat Nagari Binjai Tapan saat ini sudah melakukan upaya-upaya tersebut, seperti mengungsi ke rumah warga atau kerabat lain yang rumahnya tidak terkena dampak dari bencana alam banjir, menyiapkan tempat khusus dan aman dirumah masing-masing yang digunakan untuk mengamankan barang-barang berharga agar tidak terendam banjir, meletakkan batu maupun geobag berukuran kecil di sekeliling rumah agar banjir yang masuk ke rumah tidak terlalu besar maupun tinggi, pada saat bepergian dan terjadi hujan lebat pemerintah nagari menganjurkan untuk segera pulang dan menyiapkan diri serta barang berharga jika tiba-tiba banjir terjadi.

Disamping hal di atas, pemerintah juga melakukan gotong royong membuat tanggul darurat di tepi Sungai Batang Tapan, menyusun proposal permohonan bantuan bencana, membuat pelaporan atau daftar kerugian akibat bencana, menyiapkan tempat pengungsian serta dapur umum untuk warga yang menjadi korban bencana banjir. Dimana di dalam tempat pengungsian ini juga disediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh korban bencana tersebut. Begitu pula dengan dapur umum, disediakan juga kebutuhan pangan untuk masyarakat korban banjir, sehingga masyarakat dapat mengungsi untuk sementara waktu hingga banjir menyusut. Tidak hanya itu, pemerintah Nagari Binjai Tapan telah menyiapkan dana tanggap darurat untuk bencana banjir.

Kegiatan mitigasi bencana banjir memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah nagari Binjai Tapan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih memiliki sejumlah persoalan, terutama melihat dampak kerugian yang disebabkan banjir tahun lalu (sebagaimana table di atas). Adapun beberapa kendala (peneliti temukan pada observasi awal) yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan mitigasi bencana ini ialah terbatasnya dana nagari untuk melakukan mitigasi bencana banjir. Pemerintah nagari juga mengalami kendala, sebab sulitnya akses menuju lokasi pembangunan geobag dan kawat brojong karena jalan yang ada dapat dikatakan kurang memadai, sehingga alat berat terkendala untuk menuju lokasi tersebut.

Pada saat proses pembangunan kawat brojong dan geobag juga sering terjadi banjir mendadak yang mengakibatkan alat berat atau sarana dan prasarana yang sudah ada menjadi rusak, hal tersebut menjadi salah satu penghambat pembangunan.

Selain itu, terlepas dari kendala sarana, pemerintah nagari juga terkendala pada pembebasan lahan, sulitnya mendapatkan izin menggunakan lahan untuk pembangunan kawat brojong dan geobag ini, banyak masyarakat yang tidak memberikan izin kepada pemerintah nagari untuk menggunakan tanah atau lahannya untuk pembangunan kawat brojong dan geobag, hal ini dikarenakan lahan yang digunakan cukup banyak sebab tanah masyarakat tersebut sudah banyak runtuh oleh banjir dan sudah menjadi sungai.

Atas dasar persoalan-persoalan yang peneliti kemukakan di atas, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam memitigasi bencana banjir. Sehingga artikel ini peneliti konstruksi berdasarkan rumusan masalah “apa kendala Pemerintah Nagari dalam memitigasi bencana banjir di Nagari Binjai Tapan?”

## **METODE**

Nagari Binjai Tapan merupakan Nagari yang paling sering dilanda oleh bencana banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan berbagai upaya mitigatif telah dilakukan, namun dampak destruktif dari banjir terhadap masyarakat belum mampu diminimalisir. Sehingga penelitian ini bertujuan menelaah secara mendalam dan mendeskripsikan kendala Pemerintah Nagari dalam memitigasi bencana banjir. Untuk menjawab tujuan penelitian di atas, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif (Sugiyono, 2012:9). Penelitian di Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Teknik pengambilan informan yang peneliti ambil adalah *purposive sampling*, mengingat informan penelitian ini memiliki kriteria subjek substantif dari penanganan bencana banjir di Nagari Binjai Tapan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari Binjai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Binjai Tapan, Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan dan Masyarakat Nagari Binjai (yang terdampak bencana banjir). Kemudian pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, studi dokumen (regulasi, artikel/temuan penelitian, dan buku relevan) dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan di atas (Creswell, 2013). Setelah data diperoleh, analisis dilakukan dengan mendeskripsikan temuan yang telah direduksi dan disajikan dalam artikel ini. Sehingga durasi waktu penelitian untuk keseluruhan menghabiskan dua bulan yang terhitung sejak 19 Agustus 2022 – 19 Oktober 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bencana alam merupakan sebuah tragedi yang sering terjadi di Sumatera Barat, termasuk bencana alam banjir, khususnya di Nagari Binjai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana yang kita ketahui Nagari Binjai Tapan ini termasuk salah satu Nagari dari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, dimana daerah ini dialiri oleh empat aliran sungai yang besar, salah satunya adalah Sungai Batang Tapan. Oleh sebab itu, terbukti bahwa Nagari Binjai Tapan akan rentan terhadap bencana alam banjir.

Yohana, C., Griandini, D., dan Muzambeq, S., (2017) menyatakan bahwa banjir merupakan kondisi buruk tentang suatu peristiwa sebagai akibat terjadinya penumpukan air. Dalam hal ini di Nagari Binjai Tapan Penyebab utama banjir adalah ketika terjadi hujan lebat di hulu, maka debit air sungai akan naik serta deras, oleh karenanya aliran sungai meluap hingga kepemukiman masyarakat Binjai sehingga terjadilah bencana banjir.

Bencana banjir akan berkurang jika dilakukan upaya pencegahan dengan baik dan benar, yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Dengan dilakukannya upaya mitigasi bencana, selain dapat mencegah terjadinya bencana banjir, tetapi juga dapat meminimalisir kerugian serta bahaya yang ditimbulkan oleh banjir. Mitigasi bencana merupakan sebuah tuntutan bagi suatu daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, begitu pula daerah yang tingkat kerawanan bencananya rendah dan menengah. Hal ini dikarenakan mitigasi bencana yang dilakukan akan berdampak pada daerah yang rentan terhadap bencana tersebut.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 9 mendefinisikan bahwa mitigasi sebagai suatu tindakan yang memiliki serangkaian upaya dalam meminimlisir risiko bencana. Ramli, S. (2010:32) berpendapat bahwa mitigasi bencana harus dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan mendalam melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknis, pendekatan manusia, pendekatan administrasi, dan pendekatan kultural. Dari acuan teoritis ini, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Nagari Binjai Tapan telah melakukan upaya mitigasi bencana banjir berdasarkan seluruh pendekatan yang ada, antara lain:

Pertama, pendekatan teknis; dalam mitigasi bencana banjir, berdasarkan temuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa pemerintah nagari sudah melakukan upaya pembangunan tanggul darurat/ tanggul sementara di tepian Sungai Batang Tapan, hal tersebut dilakukan oleh pemetintah nagari bersama-sama secara gotong royong. Pembangunan ini bertujuan untuk dapat menghambat atau meminimalisir luapan air yang masuk kepemukiman masyarakat.

Kedua, pendekatan manusia; adapun bentuk mitigasi melalui pendekatan manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Binjai Tapan berdasarkan temuan dilapangan ialah memberikan peringatan dini kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi tentang kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari dengan maksud untuk memberikan pemahaman lebih dalam terkait kebencanaan terkhusus bencana alam banjir kepada masyarakat Nagari Binjai Tapan. Peringatan dini ini dilakukan pada acara-acara yang diadakan di nagari serta dimesjidmesjid pada waktu sholat, seperti sholat jumat, sholat id, dan sholat lima waktu.

Ketiga, pendekatan administrasi; pemerintah nagari membuat permohonan bantuan atau proposal baik itu dana maupun sarana dan prasarana kepada pemerintah kabupaten serta provinsi dalam menormalisasikan Sungai Batang Tapan, kemudian meminta bantuan terkait pembangunan geobag serta kawat brojong ditepian Sungai Batang Tapan, selain itu Pemerintah Nagari juga membuat laporan atau data kerugian akibat bencana banjir pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 dan diserahkan kepada pemerintah kabupaten.

Keempat, pendekatan kultural; dimana berdasarkan temuan dilapangan, bahwa pemerintah nagari sudah melakukan pendekatan berupa pengurusan izin pembebasan lahan atau tanah masyarakat untuk pembangunan geobag atau kawat brojong melalui ninik mamak yang ada dinagari, hal ini dilaksanakan karena sudah menjadi budaya di nagari Binjai bahwa hal semacam itu perlu didiskusikan bersama ninik mamak yang kemudian ninik mamak bisa mendiskusikan hal tersebut kepada kemenakan-kemenakannya. Selain dalam pengurusan izin pembebasan lahan, dalam hal gotong-royong pemerintah nagari jga berdiskusi bersama ninik mamak, sehingga nanti ninik mamak yang menghimbau kemenakan untuk melaksanakan gotong-royong.

Berdasarkan empat pendekatan sebagai bentuk dari upaya mitigasi bencana di Nagari Binjai Tapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah nagari, masyarakat, pihak kecamatan, pemerintah kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, namun dalam pelaksanaannya masih memiliki sejumlah kendala, sehingga upaya pemerintah nagari dalam mitigasi bencana banjir di Nagari Binjai Tapan dapat dikatakan masih kurang maksimal.

Pemerintah Nagari Binjai Tapan, bersama pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hambatan utama dalam melakukan mitigasi bencana banjir di Nagari Binjai yang membuat upaya mitigasi menjadi terhalang, yaitu tidak memadainya anggaran dana desa dan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk upaya mitigasi bencana ini, pemerintah nagari tidak diberi kewenangan dalam mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mitigasi bencana dan menyiapkan alat-alat mitigasi bencana, sehingga upaya mitigasi pun menjadi lambat dilakukan. Dikarenakan kurangnya dana dan anggaran, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Bersama Pemerintah Nagari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak-pihak terkait lainnya mengusulkan bantuan dana kepada pemerintah pusat yaitu untuk penganggaran dari pusat, hal ini dikelola oleh Balai Sungai Sumatera Lima (BWS5) dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) yang saat ini sudah mulai bekerja. Sebagaimana temuan Carolina, M., (2018) bahwa alokasi dana program penanggulangan bencana sangat dibutuhkan dalam kegiatan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana, ketersediaan dan kecukupan logistik di area rawan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi social-ekonomi di kawasan pasca-bencana, tanggap darurat di daerah terdampak bencana dan pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kesiapan dalam menghadapi bencana pada setiap daerah.

Pemerintah Nagari Binjai Tapan juga mengalami hambatan dalam upaya mitigasi bencana banjir, pertama adalah pada anggaran atau dana, dimana pemerintah nagari tidak diberi kewenangan dalam mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mitigasi bencana dan menyiapkan alat-alat mitigasi bencana. Kendala lainnya yang dihadapi oleh pemerintah nagari adalah kurangnya sumber daya yang tersedia di nagari, selain itu jauhnya jarak dari BPBD kabupaten juga menyebabkan kesulitan untuk menyediakan sarana yang dibutuhkan mandesak untuk mitigasi bencana atau

evakuasi korban bencana. Tidak hanya pada dan serta sarana tetapi pemerintah nagari juga terkendala sebab kurangnya sumber daya manusia yang profesional dibidang kebencanaan, hal ini menyebabkan kurang efektifnya upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Selain itu, pemerintah nagari juga terkendala pada perizinan, masyarakat nagari tidak mau melepaskan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pembangunan *rever wall* atau geobag dan kawat brojong. Hal ini menyebabkan terhambatnya upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah nagari maupun pemerintah pusat. Izin yang terhambat dari masyarakat untuk melakukan pembangunan yang melindungi masyarakat dari bahaya sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Anggara, B., Idris, A., dan Hasanah, M., (2019) bahwa pemerintah berperan besar untuk mengatur dan menata penggunaan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang yang menstimulus dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Kendala yang menyebabkan kurang efektifnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan dalam melakukan upaya mitigasi bencana banjir di Nagari Binjai Tapan yaitu kurangnya personil atau sumber daya manusia dalam melakukan mitigasi, serta kurang memadainya sarana dan prasarana atau peralatan kebencanaan yang dimiliki. Jarak antara BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nagari Binjai Tapan diperkirakan kurang lebih 135 KM dengan estimasi perjalanan 3,5 jam, hal tersebut membuat kurang efisiennya upaya mitigasi yang dilakukan, sebab jika terjadi bencana banjir secara mendadak, maka pihak dari BPBD, ataupun relawan dan tim sar tidak akan sampai tepat waktu di lokasi bencana. Jarak tempuh yang jauh juga menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi mitigasi bencana yang kemudian mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Sebagaimana temuan Arimastuti, A., (2011) bahwa sosialisasi dalam upaya pengurangan risiko bencana merupakan salah satu dari seluruh program pemerintah yang berkenaan dengan kepentingan rakyat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya juga memiliki kendala dalam upaya mitigasi bencana banjir di Nagari Binjai Tapan ini, yaitu adanya kendala pada material bahan yang digunakan untuk pembangunan *rever wall*, seperti batu-batu gajah atau atau nama lainnya adalah batu jetty. Karena didalam kontrak pelaksanaan pembuatan *rever wall* itu diwajibkan memakai batu yang memiliki izin atau tambang yang mempunyai izin atau legal. Tidak diperbolehkan menggunakan batu yang tidak mempunyai izin atau tambang ilegal. Berupaya untuk mencari material atau bahan yang legal dan akhirnya pada saat ini sudah menemukan lokasi di daerah Punggasan yang tambangnya sudah memiliki izin dan legal. Saat ini material atau batu-batu tersebut diangkut dan dibawa dari Air Haji ke daerah Binjai Tapan. Pembentukan *river wall* menggunakan batu kualitas tinggi sangat dianjurkan, sebagaimana temuan Japan Water Agency (tanpa tahun) dalam laporan studi mereka untuk membangun aliran air yang nyaman dan bersahabat dengan pemukiman masyarakat.



## SIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dan pembahasan artikel ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam mitigasi bencana banjir belum maksimal, hal ini disebabkan oleh anggaran yang terbatas, minimnya alat mitigasi kebencanaan, sarana evakuasi kurang memadai, sulitnya izin dari masyarakat untuk membangun *rever wall* di lahannya, kurangnya SDM melakukan mitigasi dan material bahan pembangunan *rever wall* yang minim. Sehingga langkah utama untuk mitigasi bencana banjir Nagari Binjai Tapan, maka enam kendala tersebut harus segera dipenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, B., Idris, A., dan Hasanah, M. (2019). Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7 (2): 879-890.
- Arimastuti, A. (2011). Tahapan Proses Komunikasi Fasilitator Dalam Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (Studi Kasus Terhadap Tim Compress Lipi dalam Pelatihan Evakuasi Mandiri bagi Masyarakat Pantai terhadap Bahaya Tsunami (Pra Tsunami)). *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol. 2, No. 2.
- Bakornas PB. (2006). *Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, SatBakornas Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Carolina, M., (2018). Kelemahan-Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. *Buletin APBN: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, Vol. III, Edisi 18.
- Creswell, J. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Research Design*.
- Final Report of Japan Water Agency. The Detailed Design Study for the Pasig-Marikina River Channel Improvement Project (Phase IV). CTI Engineering International Co., Ltd./Japan Water Agency Nippon Koei Co., Ltd. Diakses dari [https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000043553\\_02.pdf](https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000043553_02.pdf).
- Kodoatie, RS. (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Purba, N., (2022). Strategi Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Diakses dari [http://eprints.ipdn.ac.id/7934/1/Ringkasan%20Novendri%20Purba%2029.1037\\_J-5\\_MKKP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/7934/1/Ringkasan%20Novendri%20Purba%2029.1037_J-5_MKKP.pdf).
- Ramli, S. (2010). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Dialog Rakyat.
- Sudibyakto. (2011). *Manajemen Bencana di Indonesia ke Mana?* Yogyakarta: Gajah Mada University PRESS.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Yohana, C., Griandini, D., dan Muzambeq, S. (2017). Penerapan Pembuatan Teknik Lubang Biopori Resapan Sebagai Upaya Pengendali Banjir. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (J PMM)*, Vol. 1, No. 2.